

**KINERJA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI
LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN JALAN
(Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2021)**

(Skripsi)

Oleh:

WANDA YUNITA SARI

NPM 1816021062



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

KINERJA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN JALAN (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2021)

Oleh:

Wanda Yunita Sari

Infrastruktur jalan yang ada di Indonesia merupakan Infrastruktur jalan yang digunakan terutama untuk angkutan barang dan angkutan penumpang. Kondisi jalan yang baik merupakan syarat dasar untuk mendukung pertumbuhan suatu daerah. Proses pemeliharaan jalan terus dilakukan meskipun demikian masih banyak jalan yang terpantau rusak di Kota Bandar Lampung. Kerusakan jalan ini menjadi penghambat masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari, kerusakan jalan ini juga membuat mobilitas masyarakat menjadi terganggu. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam Pemeliharaan Jalan studi dilakukan pada Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan selanjutnya untuk Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu melalui tahap reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini berdasarkan tiga sudut pandang yang menjadi tolak ukur utama untuk menentukan Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Dalam Pemeliharaan Jalan (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung) maka secara keseluruhan kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sudah optimal.

Kata Kunci: Kinerja, Infrastruktur, Jalan.

ABSTRACT

PERFORMANCE OF THE CLAN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION DEVELOPMENT SERVICES OF LAMPUNG PROVINCE IN ROAD MAINTENANCE

(Study in Sukarame District, Bandar Lampung City in 2021)

By

Wanda Yunita Sari

The existing road infrastructure in Indonesia is a road infrastructure used mainly for the transportation of goods and passenger transportation. Good road conditions are a basic requirement to support the growth of an area. The road maintenance process continues, however, there are still many damaged roads in Bandar Lampung City. This road damage is an obstacle for the community in carrying out their daily activities, this road damage also makes people's mobility disrupted. Therefore, the formulation of the problem in this study is how the performance of the Department of Highways and Construction of Lampung Province in Road Maintenance The study was conducted in Sukarame District, Bandar Lampung City. This study uses descriptive qualitative research methods. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. And then for the data analysis technique in this study, namely through the stages of data reduction, data presentation and also drawing conclusions. The results of this study are based on three points of view which are the main benchmarks for determining the Performance of the Department of Highways and Construction Development of Lampung Province in Road Maintenance (Study in Sukarame District, Bandar Lampung City) then the overall performance of the Department of Highways and Construction Development of Lampung Province is optimal.

Keywords: Performance, Infrastructure, Road

**KINERJA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI
LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN JALAN
(Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2021)**

**Oleh:
Wanda Yunita Sari**

**Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **KINERJA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMELIHARAAN JALAN (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2021)**

Nama Mahasiswa : **Wanda Yunita Sari**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816021062**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dr. Robi Cahyadi urniawan, S.IP., M.A.
NIP. 19780430 200501 1 002

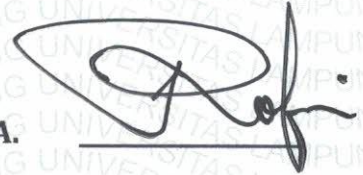
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 19611218 198902 1 001

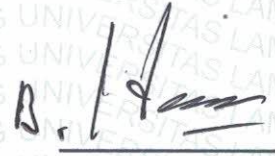
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Robi Cahyadi Farniawan, S.IP., M.A.



Penguji : Budi Harjo, S.Sos., M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 01 April 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Maret 2022
Yang Membuat Pernyataan



Wanda Yuniṭa Sari
NPM. 1816021062

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Wanda Yunita Sari yang dilahirkan di Way Kanan pada tanggal 28 Oktober 2000, penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Kamrus dan Ibu Yuliyanti.

Pendidikan yang telah penulis tempuh adalah SDN 01 Way Tuba, yang terletak di Kecamatan Gunung Labuhan yang penulis tempuh sejak tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan studi pada SMPN 03 Gunung Labuhan yang juga terletak di Kecamatan Gunung Labuhan yang penulis tempuh sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan pada SMAN 02 Gunung Labuhan pada tahun 2015 sampai dengan 2018. Dan ditahun yang sama yaitu 2018 penulis diterima sebagai mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

MOTTO

“Teruslah Bermimpi, Suksesmu Punya Jalannya Sendiri”

Wanda Yunita Sari

“The secret of life is to fall seven times and to get up eight times”
(Rahasia hidup adalah jatuh tujuh kali dan bangun delapan kali)

From The Alchemist, by Paulo Coelho

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahanhati, serta penuh cinta dan kasih sayang atas hasil buah pikir sederhana ini saya persembahkan untuk:

Tuhan yang Maha Esa, Allah SWT

Almarhumah Ibunda Terkasih di Surganya Allah

Ayah terhebat diseluruh alam semesta ini

Kakak dan Adik yang teristimewa

Sahabat-sahabat terbaik

Serta Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, sega puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan segala alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya. shalawat dan salam tak lupa selalu penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa Rahmatan Lil'alamin, serta kepada dua malaikat yang setiap saat mencatat segala tingkah laku penulis, dengan sangat jujur dan tanpa Lelah, Raqib dan Atid. Penulisan skripsi berjudul "Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam Pemeliharaan Jalan (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2021)" ini merupakan syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis berharap karya yang merupakan wujud kerja dan pemikiran serta didukung dengan bantuan dan keterlibatan berbagai pihak ini dapat bermanfaat kembali.

Selanjutnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tidak sedikit kesulitan yang dihadapi selama penulisan skripsi ini. oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku rector Universitas Lampung;
2. Ibu Dra Ida Nurhaida, M.Si, selaku dekan Fisip Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. R Sigit Krisbiantoro, M.IP, selaku ketua jurusan Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A, selaku pembimbing utama penulis yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran maupun kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Budi Harjo, S.SOS, M.IP, selaku penguji utama pada proses ujian dari mulai proposal sampai dengan skripsi ini;
6. Bapak Reza Laksana selaku Kepala Bidang Kepegawaian pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang banyak membantu penulis dalam melaksanakan proses pengumpulan data dilapangan;

7. Bapak dan Ibu yang ada di Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung yang sangat ramah dan baik kepada penulis;
8. Almarhumah Ibunda, Hallo bunda sayang I Did it, aden tepatin janji aden ya nda lulus tepat waktu kalo bisa dapat predikat Cumlode kek yang bunda mau, sayang bunda banyak-banyak, aden gapunya bunda lagi didunia ini padhal cuman beberapa bulan lagi aden lulus kuliahnya tapi bunda gabisa nunggu lagi, tapi gapapa aden semangat kok kek yang bunda pesanin buat aden untuk terus semangat dan yakin kalo bunda sayang sekali sama aden, aden kangen nda;
9. Ayah, semangat ya yah maaf kalo aden belum bisa jadi anak yang membanggakan dalam hal apapun, tapi aden bangga sekali punya ayah yang sangat penyayang, perhatian dan lucu. Semangat kerjanya ya yah jangan capek-capek dan jangan sampai sakit, semoga ayah Panjang umur.
10. Bahan, terimakasih bahan sudah jadi kakak terbaik buat aden, kakak yang seperti sahabat, yang peduli dan selalu mengayomi aden, untuk bahan juga semangat ya hidup itu adil dan pasti selalu adil, aden percaya bahan akan jadi orang yang sangat sukses kelak;
11. Adek Nadia, hallo sayangnya aden kesayangannya aden walau selalu berantem. Jangan keras kepala ya, jangan malesan, dan jangan dengerin omongan jahat orang-orang;
12. Sahabat yang selalu nemenin part of every step in my life sejak SMA, yang selalu dibilang pacarana, dan segala macem lainnya. Terimakasih babon sudah selalu ada waktu butuh. Selalu jadi support system dan penghibur waktu sedih;
13. Untuk calon ibu yang baik, Rafita, Lili, Tiara, Destia semoga kita benar-benar jadi ibu yang baik ya. Beruntung sekali dapat sahabat seperti kalian;
14. Buat anak-anak kosan, yang lengkap semua kelakuannya, sikapnya dan suara melengkingnya terimakasih sudah jadi bagian keseharian saya selama kuliah;
15. Teman-teman Governance 2018 untuk momennya selama kurang lebih 4 tahun ini;

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang dan Masalah	1
1.2. Penelitian Terdahulu	10
1.3. Rumusan Masalah	15
1.4. Tujuan Penelitian	16
1.5. Kegunaan Penelitian.....	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Kinerja.....	17
2.1.1. Pengertian Kinerja dan Manajemen Kinerja	17
2.1.2. Prinsip Dasar Manajemen Kinerja	18
2.1.3. Pengukuran Kinerja.....	19
2.1.4. Evaluasi Kinerja.....	20
2.1.5. Tujuan dan Manfaat Manajemen Kinerja	20
2.1.6. Model Pengukuran Kinerja	22
2.2. Infrastruktur Jalan	24
2.2.1. Pengertian Infrastruktur Jalan	24
2.2.2. Pengertian Jalan	25
2.3. Pelayanan Publik.....	25
2.3.1. Pengertian Pelayanan Publik.....	25
2.3.2. Tujuan Pelayanan Publik.....	26
2.3.3. Asas dan Prinsip Pelayanan Publik.....	26
2.4. Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Lokasi dan Waktu	30
3.3. Fokus Penelitian	30
3.4. Informan.....	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6. Teknik Pengolahan Data	33
3.7. Teknik Analisis Data.....	34

IV. GAMARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	45
4.1. Gambaran Umum Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	36
4.1.1 Sejarah Singkat.....	36
4.1.2 Visi dan Misi.....	37
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	38
4.1.4 Struktur Organisasi	42
4.2. Gambaran Umum Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung	45
4.2.1 Geografi.....	45
4.2.2 Administrasi	45
4.2.3 Topografi.....	46
4.2.4 Demografi	47
4.3. Kondisi Jalan Provinsi Lampung	49
4.4. Kondisi Jalan Mayjend H.M Ryacudu	51
V. HASILDAN PEMBAHASAN	52
5.1. Hasil dan Pembahasan.....	52
5.1.1 Produktivitas	52
5.1.2 Kualitas Pelayanan	56
5.1.3 Responsivitas	60
5.1.4 Responsibilitas	64
5.1.5 Akuntabilitas	68
5.2. Pembahasan	73
VI. SIMPULAN DAN SARAN	81
6.1 Kesimpulan	81
6.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	86

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keadaan dan Panjang Jalan di Kota Bandar Lampung	3
2. Indikator Kinerja Dinas BMBK yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD	9
3. Penelitian Terdahulu	10
4. . Luas Wilayah Sukarame	45
5. Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut menurut Kelurahan di Kecamatan Sukarame, Tahun 2018.....	47
6. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan menurut Kelurahan di Kecamatan Sukarame, Tahun 2018.....	48
7. .Kepadatan Penduduk menurut Kelurahan di Kecamatan Sukarame, Tahun 2018	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2018	2
2. Kondisi jalan Ryacudu (Selasa, 30 April 2019).....	5
3. Warga timbun sendiri jalan Ryacudu (Rabu, 3 April 2019)	6
4. Belum Lama Diperbaiki, Jalan Ryacudu Kembali Rusak (24/4/2020).....	7
5. kondisi jalan Jalan Ryacudu Korpri Raya Sukarame Bandar Lampung 8sudah dilintasi oleh pengguna jalan (Rabu, 13 Oktober 2021)	8
6. erangka Pikir	28
7. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung	44
8. Peta Administrasi Wilayah Kecamatan Sukarame.....	46
9. Grafik Kondisi Jalan Provinsi Lampung Tahun 2014-2018	48

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Sistem kekuasaan di Indonesia antara pemerintah pusat dan daerah sudah berkembang dengan adanya otonomi daerah yang berupa pembagian kewenangan yang di berikan secara utuh kepada daerah tersebut untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, dengan fokus tujuan menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik (Herlinda, 2020, p. 14). Pemerintah daerah dalam memenuhi fokus tersebut juga memiliki kewenangan dalam perencanaan pembangunan daerah tanggung jawab penyelenggaraan dalam pemeliharaan infrastruktur jalan berada di bawah wewenang pemerintah daerah. Yang dengan ini harus diikuti dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola baik dalam segi Teknik, manajerial dan pembiayaan dalam penyelenggaraan jalan (Armando Soares, 2015, p. 232).

Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan mengartikan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan merupakan bagian dari infrastruktur yang memiliki peran penting sebagai sarana transportasi dalam menunjang aktivitas masyarakat setiap harinya, Infrastruktur jalan juga memiliki peran yang strategis sebagai penunjang kegiatan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Infrastruktur

jalan yang ada di Indonesia merupakan Infrastruktur jalan yang digunakan terutama untuk angkutan barang dan angkutan penumpang. Kondisi jalan yang baik merupakan syarat dasar untuk mendukung pertumbuhan suatu daerah (Virginia Sisilia Mamahit, 2021, p. 12).

Pengelolaan jaringan jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung berpedoman kepada asas desentralisasi (pengelolaan jalan dan jembatan provinsi) dan asas dekonsentrasi (pengelolaan jalan dan jembatan nasional). Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/234.a/III.09/HK/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi memiliki kewajiban dalam hal penyelenggaraan dan penanganan ruas jalan provinsi sebesar 1,693.273 Km (99 Ruas Jalan), dengan jumlah jembatan sebanyak 658 buah, tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Kemudian kondisi ruas jalan provinsi pada akhir tahun 2018 yang berada dalam kondisi Baik (kerusakan permukaan < 6%) adalah sepanjang 1.140,178 Km (sekitar 67,34%). Kondisi Sedang (kerusakan permukaan 6 – 11 %) sepanjang 167,481 Km (sekitar 9,89%). Sisanya ruas jalan provinsi masih berada dalam kondisi Rusak Ringan (11-%) masing-masing berkisar 5,06% dan 17,71%. (Lampung, 2020)

Kondisi Jalan Provinsi Th. 2018



Gambar 1. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2018
(sumber: RENSTRA DINAS BMBK 2019-2024)

Selanjutnya untuk kondisi jalan yang ada di Kota Bandar Lampung di sajikan dalam tabel di bawah ini:

Keadaan dan Panjang Jalan di Kota Bandar Lampung (km), 2016-2020

Tabel 1. Keadaan dan Panjang Jalan di Kota Bandar Lampung

Uraian/Description	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. JENIS PERMUKAAN	900,320	922,568	353,641	353,641	556,216
a. Aspal	900,320	922,568	325,255	338,751	542,333
b. Kerikil/Onclslag	-	-	11,560	6,768	8,330
c. Tanah/Awccas	-	-	16,826	8,122	5,553
d. Tidak dirinci	-	-	-	-	-
II. KONDISI JALAN	900,320	918,568	353,640	353,641	556,216
a. Baik	854,188	733,78	931,200	983,251	216,987
b. Sedang	-	51,896	144,830	163,679	245,370
c. Rusak	46,132	60,395	121,120	137,503	79,976
d. Rusak Berat	-	72,497	156,490	62,574	13,883
e. Tidak Dirinci	-	-	-	6,634	-
III. KELAS JALAN	900,320	922,568	353,641	353,641	556,216
a. Kelas I	-	-	-	-	-
b. Kelas II	-	-	-	-	-
c. Kelas III	-	-	-	-	-
d. Kelas III.A	900,320	922,568	93,430	33,500	33,500
e. Kelas III.B	-	-	471,530	131,010	131,010
f. Kelas III.C	-	-	422,583	229,650	229,650
g. Tidak Dirinci	-	-	366,098	959,481	162,056
Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung/Public Work Service of Bandar Lampung Municipality					

(sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung)

Proses pemeliharaan jalan terus dilakukan meskipun demikian masih banyak jalan yang terpantau rusak di Kota Bandar Lampung, seperti jalan Kemuning hingga Kutilang Kecamatan Sukarame, kemudian seperti yang di beritakan oleh lampung post pada November 2021 di Jalan Ki Agus Anang, Koala, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, puluhan kendaraan tidak dapat melintas akibat ruas jalan terendam air. Ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa. Selain Jalan Ki Agus Salim, menurut informasi yang dihimpun Lampost.co banjir juga merendam beberapa ruas jalan lainnya seperti di Jalan Kartini, Jalan ZA Pagar Alam (depan BPJS Kesehatan), Jagabaya, Jalan Yos Sudarso, Waylunik, dan Sepang Jaya (Purnama, 2021).

Dalam menanggapi berbagai keluhan ini di kutip dari Tribun Lampung.co.id Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan mengatakan pemeliharaan jalan lingkungan terus berlanjut, dalam upaya pemeliharaan ini masyarakat dapat melapor kepada RT atau lurah setempat sehingga dapat segera di tangani (Sholichin, 2019). Terlepas dari upaya Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam pemeliharaan jalan di kota Bandar Lampung, Kondisi jalan Jalur dua Korpri atau jalan Ryacudu menjadi sorotan dimana jalan ini rusak parah dari tahun 2019 sampai masyarakat turun tangan sendiri untuk mengatasi keadaan ini dengan cara menimbun lubang jalan dengan batu kerikil (Sholichin, 2019).

Hal tersebut membuat kinerja dinas Bina patut dipertanyakan. Jalur dua Jalan Ryacudu, Korpri, Kecamatan Sukarame, merupakan jalan provinsi yang mana kewenangan dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan infrastruktur jalan ada pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Kewenangan ini di peroleh dari pelimpahan kewenangan oleh pemerintah daerah Provinsi Lampung. Dengan adanya tanggung jawab kewenangan yang di limpahkan ini dapat di jadikan acuan kinerja dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terkait

peranan penting jalan sebagai sarana transportasi yang menunjang kegiatan sehari-hari masyarakat sekaligus sebagai sarana meningkatkan perekonomian masyarakat.

Jalan Mayjend H.M. Ryacudu yang terletak di kecamatan sukarama kota Bandar Lampung mengalami kerusakan parah sejak di bangunnya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada tahun 2019. Semenjak di resmikannya Jalan Tol Trans Sumatera Bakauheni-Terbanggi Besar, jalur dua jalan Ryacudu banyak di lalui oleh kendaraan-kendaraan besar yang membawa muatan yang relatif berat, sehingga kondisi ini semakin memperparah kerusakan yang terjadi di ruas jalan tersebut. Banyak terdapat lubang-lubang jalan yang membuat para pengendara harus lebih teliti dan waspada di tambah jika turun hujan yang akan membuat kondisi jalan semakin buruk karena adanya genangan-genangan yang seringkali membuat pengendara tidak tau bahwa di bawah genangan tersebut ada lubang jalan yang cukup dalam, hal ini juga meningkatkan intensitas terjadinya kecelakaan (Fernando, 2019)



Gambar 1. kondisi jalan Ryacudu (Selasa, 30 April 2019)
(sumber: artikel berita www.kupastuntas.co)

Seperti yang di beritakan pada surat kabar Tribun Lampung (Edisi 2 April 2019), di beritakan bahwa kondisi jalan Ryacudu yang rusak parah belum juga diperbaiki sehingga warga sekitar turun tangan untuk menimbun jalan-jalan yang berlubang yang mana kondisi jalan ini terlihat jelas di jalur dua Ryacudu,

Korpri tepatnya di depan gedung DPD Banteng Muda Indonesia. Menurut pantauan awak Tribun Lampung banyak lubang menganga di banyak titik, dengan kondisi berlumpur lantaran tersiram hujan. lubang-lubang tersebut berada mulai dari setelah flyover Sultan Agung-Ryacudu hingga menuju pintu tol trans Sumatera.

Dalam artikel berita tersebut dikatakan titik kerusakan terparah ada di depan Rumah Makan Cobek Sembilang. Kemudian, di depan gang menuju SMP Negeri 21 Bandar Lampung. Selanjutnya, di depan Kedai Cemil Dimsum dan Sate Obong. Ada juga di depan kantor DPD Banteng Muda Indonesia. Khusus di depan gang menuju SMPN 21 dan Rumah Makan Uni Saiyo, kerusakan jalan merata sekitar 800 meter. Dengan lubang besar berkedalaman 20-25 cm dan lebar 40 cm. kondisi jalan Racudu yang rusak ini berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, terlebih bagi pengendara motor yang bisaterjebak di jalan berlubang dengan kedalaman antara 20-25 cm (Sholichin, 2019).



**Gambar 2. warga timbun sendiri jalan Ryacudu (Rabu, 3 April 2019)
(sumber: artikel berita lampung.tribunnews.com)**

Dalam artikel berita yang di terbitkan oleh Lampung Geh.id pada tanggal 19 Oktober 2021 dimana pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung melakukan perbaikan sebagai tindak lanjut dari kondisi jalan Mayjend H.M. Ryacudu yang mengalami kerusakan parah. Karena kondisi jalan rusak itu, pada tahun Anggaran 2019,

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) memutuskan membangun jalan sepanjang 3,3 km ini selevel dengan jalan tol. Dalam berita tersebut dikatakan Pembangunan rigid beton akan dipilih. Kemudian, ketinggian badan jalan akan dinaikkan menjadi 55 cm yang terdiri dari cor dan base. Mengingat kondisi sebelumnya dimana Tinggi badan jalan sejajar dengan bahu jalan sehingga membuat genangan air di badan jalan. Pelaksanaan pembangunan jalan provinsi koridor 2 dilakukan bertahap mulai dari tahun 2019, 2020, dan hingga kini tahun 2021 (Gautama, 2021).

Ruas jalan Ryacudu ini mengalami perbaikan bertahap, namun pada tanggal 24 April 2020 kembali mengalami kerusakan sehingga pengendara yang melintas harus berhati-hati., kurang lebih sepanjang 5 meter kondisi jalan tampak berlubang dan bergelombang serta menyebabkan kendaraan yang melintas berjalan perlahan untuk menghindari jalan yang rusak tersebut (Saputra, 2020)



Gambar 3. Belum Lama Diperbaiki, Jalan Ryacudu Kembali Rusak (24/4/2020)
(sumber: artikel berita yang terbit di lampung.tribunnews.com)

Kerusakan infrastruktur jalan yang terjadi di kecamatan Sukarame tepatnya di jalur dua Ryacudu, Korpri. Memakan waktu perbaikan yang lumayan lama, bahkan pada awal-awal kerusakan warga harus turun tangan sendiri untuk memperbaiki kondisi jalan. Perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung pada tahun 2019 hanya sekedar

menambal jalan dengan batu-batu kerikil yang mana hal ini tidak efektif karena banyaknya lubang apalagi saat hujan turun kondisinya akan semakin parah dan berbahaya (Sholichin, 2019). Sampai saat ini (13 Oktober 2021) pengerjaan perbaikan jalan ini belum seratus persen selesai masi di lakukan berbagai penyelesaian di bahu-bahu jalan secara bertahap, namun sudah dapat di lalui oleh para pengguna jalan.



Gambar 4. kondisi jalan Jalan Ryacudu Korpri Raya Sukarame Bandar Lampung sudah dilintasi oleh pengguna jalan (Rabu, 13 Oktober 2021) (sumber: Artikel Berita lampung.tribunnews.com)

Seperti yang kita ketahui Bersama Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyelenggara agar terciptanya infrastruktur yang baik, menyediakan sarana dan prasarana pada masyarakat dalam bidang pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan peningkatan jalan dan jembatan yang rusak sehingga pelayanan publik terpenuhi dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung” dan memilih jalan Mayjend H.M. Ryacudu sebagai tempat penelitian di karenakan jalan ini merupakan akses yang paling sering di lalui masyarakat dan memiliki mobilitas yang tinggi, di tambah

sekarang menjadi lajur atau jalan yang di lalui kendaraan yang keluar dari gerbang tol.

Indikator Kinerja dibawah ini menunjukkan bahwa kondisi akhir tahun 2018 (kondisi jalan mantap 77%) sebagai pijakan untuk mencapai kinerja pada akhir RPJMD tahun 2024 (kondisi jalan mantap 83%) dengan perincian tabel tahapan pencapaian tiap tahun sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Dinas BMBK yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Rencana Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
					1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah		Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	78%	79%	80%	81%	82%	83%	83%
2		Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Tingkat kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Persentase	78%	79%	80%	81%	82%	83%	83%

(Sumber: RENSTRA BMBK 2019-2024)

Dapat dilihat tabel 7.1 merupakan indikator kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. terlihat bahwa pada periode RPJMD 2019-2024 target kenaikan kondisi kemantapan jalan provinsi adalah sekitar 1% per tahun. Sehingga kondisi akhir yang hendak dicapai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) sebesar 83%.

Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun

2019-2024 yang telah ditetapkan. Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan yang masuk dalam isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas yang ada dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun.

1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Penulis	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Akhmad Lutfi Nahar	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam Pengembangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2016 (Studi Kasus Taman Tingkir Kota Salatiga)	Dalam penelitian ini mempunyai jenis analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas PU dan Tata Ruang ini telah memberikan pelayanan baik kepada masyarakat dilihat dari kepuasan masyarakat terhadap adanya Taman Tingkir di Kota Salatiga. Rata-rata rentang kepuasan yang ditunjukkan oleh masyarakat berada di 80,0% dimana rata-rata tersebut masuk dalam kategori “sangat setuju”. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat banyak yang puas dengan adanya taman kota. Melalui pengukuran

			kinerja dari hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan agar terlihat sejauhmana pelaksanaan kinerjanya.
Muhammad Al Derajad	Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan di Kecamatan Suaharjo	Dalam penelitian ini mempunyai jenis analisis data yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif	Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung tidak efektif. Di karenakan kurangnya kerjasama antara pihak Dinas dan pihak pekerja terkait bahan baku yang di gunakan, dan juga kurangnya daya tanggap dalam penyediaan bahan baku jalan, fasilitas pejalan kaki dan kurangnya pemantauan akan keberadaan drainase
Retno Hidayati	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Penanggulangan Banjir dan Genangan di Kota Surabaya	Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada aspek responsivitas, daya tanggap terhadap laporan/keluhan

			<p>masyarakat terkait drainase, daya tanggap terhadap bencana banjir yang terjadi, dan daya tanggap dalam memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat adalah cukup baik. Pada aspek tanggung jawab, sudah adanya kesesuaian antara landasan hukum dengan program kerja yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada aspek akuntabilitas kepada pejabat publik terkait sudah dilakukan dengan baik, namun pertanggungjawaban kepada masyarakat masih kurang sehingga masyarakat masih belum mengetahui tugas dan program penanggulangan banjir dan genangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan</p>
--	--	--	--

			Umum dan Penataan Ruang.
Dhita Flafiya Indriyani	Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah (Studi Kasus Kerusakan Jalan)	Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yaitu jenis penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan bersifat deskriptif analitis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni metode pendekatan untuk memahami permasalahan dengan mendasarkan pada teori-teori hukum lalu dikembangkan dengan berdasarkan pada data yang diperoleh di lapangan.	Prosedur penyelenggaraan jalan daerah yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang diawali dengan pengajuan usulan dalam bentuk proposal pembangunan jalan oleh perwakilan dari masyarakat. Standar pelayanan publik terkait penyelenggaraan jalan daerah yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang tertera dalam Pasal 5 angka 21 sampai dengan angka 33 Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 84 Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Beberapa poin tersebut

			<p>belum bisa dikatakan berjalan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dengan masih kerap ditemukannya kerusakan jalan dari kerusakan jalan ringan sampai kerusakan jalan berat pada ruasruas jalan di Kabupaten Tulang Bawang.</p>
<p>Yohanes F.C. Ransun Freddie Kalangie Yurnie Sendow</p>	<p>Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Daerah</p>	<p>Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti</p>	<p>Kinerja Dinas Pekerjaan Umum selaku SKPD yang diberikan amanat untuk pemeliharaan jalan daerah sangatlah disoroti mengingat jalan merupakan sarana utama yang selalu dipakai oleh masyarakat. Penelitian ini mencoba melihat dan menguraikan mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam pemeliharaan jalan di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif</p>

			<p>untuk dapat menggali lebih dalam dan akurat tentang kinerja organisasi ini. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Manado dalam pemeliharaan jalan masih buruk dan terkesan pembuatan dan pemeliharaan jalan hanya asal-asalan saja.</p>
--	--	--	--

Dari berbagai pemaparan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat diketahui penelitian ini memiliki perbedaan yaitu penelitian ini akan berfokus pada kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang mana dalam penelitian ini akan di deskripsikan dengan detail mengenai hal-hal terkait kinerja Dinas Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah: Bagaimana Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukarame

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukarame

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini peneliti berharap dapat memberikan kajian atau bahan dasar maupun tambahan dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya yang berhubungan dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
2. Secara praktis, peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat di jadikan masukan atau perbandingan bagi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam melakukan tugas dan fungsinya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kinerja

2.1.1. Pengertian Kinerja dan Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja diartikan sebagai manajemen untuk membuat hubungan dan komunikasi yang efektif. Manajemen Kinerja dengan kebutuhan organisasi, pimpinan, dan pegawai. kinerja sering disamakan dengan istilah-istilah lainnya yang memiliki arti mirip dengan kinerja seperti prestasi kerja, kinerja, produktivitas, kecakapan, usaha, kinerja pekerjaan, inisiatif, loyalitas, potensi kepemimpinan, dan moral kerja. Kinerja adalah istilah yang banyak dipakai sekarang, namun tidak ada definisi yang disepakati secara umum. Dalam beberapa organisasi, istilah tersebut dianggap sebagai nama lain untuk manajemen berdasarkan sasaran. Organisasi-organisasi lainnya terkait dengan peristiwa tahunan yang berhubungan dengan pelatihan dan pengembangan atau suatu proses yang berkaitan dengan pembayaran/pengupahan berdasarkan kinerja (Akhmad Fauzi, 2020, p. 1)

Secara estimologis kata kinerja dapat disamakan artinya dengan kata *performance* yang berasal dari bahasa Inggris. Kinerja atau kinerja organisasi pada umumnya ditetapkan sebagai kesuksesan seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya (Akhmad Fauzi, 2020, p. 1) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika (Prawisentono, 2020, p. 1)

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance*. Menurut Mangkunegara yang dikutip oleh A. Fauzi (2020, p. 3), kinerja

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Secara sederhana Nawawi dalam A. Fauzi (2020, p. 3) mendefinisikan kinerja (karya) adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik fisik maupun non-fisik. Kinerja merupakan indikator dari hasil kerja karyawan dalam suatu periode tertentu, maka diperlukan suatu kegiatan penilaian atas hasil kerja tersebut (penilaian kinerja). menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual dengan standar kerja yang telah ditetapkan.

Dari berbagai definisi mengenai kinerja di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja organisasi merupakan buah atau hasil dari suatu pekerjaan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan suatu instansi untuk mencapai tujuannya yang mana dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang ada.

2.1.2.Prinsip Dasar Manajemen Kinerja

Manajemen kinerja merupakan proses yang dilakukan secara kontinu dan saling berkaitan. Menurut A. Fauzi (2020, p. 9) manajemen Kinerja didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Perencanaan Perencanaan merupakan kegiatan menentukan tujuan dan sasaran suatu organisasi, melakukan evaluasi atau penilaian secara periodik dan terus menerus kinerja
2. Manajemen kinerja harus dapat meningkatkan kinerja pegawai. Prestasi kerja pegawai yang dicapai kadang tidak tercapai. Dengan melakukan perbaikan secara terus menerus dan melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang menjadi penyebab penurunan kinerja.
3. Proses manajemen didasarkan pada kejujuran antara pimpinan, pegawai, dan rekan kerja. Pegawai harus diajak memberikan masukan yang jujur mengenai pekerjaan, apa yang disukai, apa yang mau dan apa masukan mereka terhadap organisasi. Dan sebaliknya, pimpinan harus jujur menceritakan kebenaran tentang hubungan dengan karyawan.

4. Keberlanjutan, dalam pelaksanaan manajemen kinerja ditetapkan suatu standar kerja yang diberlakukan bagi pegawai dan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Manajemen kinerja dilakukan secara terus menerus setiap ada penurunan kinerja harus dilakukan evaluasi dan perbaikan bila ada kekurangan.
5. Menciptakan Budaya Kejujuran, manajemen kinerja bila dilaksanakan terus menerus dan perbaikan organisasi berkelanjutan akan memunculkan budaya seperti pentingnya mutu pekerjaan, inovasi, kreativitas, disiplin, dan lain-lain dari setiap individu. Bila sudah menjadi budaya maka kinerja sebuah organisasi akan berkembang pesat.

2.1.3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai monitoring dan pelaporan program berjalan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kinerja yang diukur dapat ditekankan pada jenis atau level program yang dijalankan (proses), produk atau layanan langsung yang dihasilkan (output), maupun hasil ataupun dampak dari produk atau layanan (outcome). Program yang dimaksud dapat berupa aktivitas, proyek, fungsi, atau kebijakan yang telah teridentifikasi tujuannya atau sasarannya.

Menurut Adisasmita yang dikutip oleh M. Alderajat (2015, p. 19)

“pengukuran kinerja adalah alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Instansi pemerintah dikatakan berhasil melaksanakan tugasnya, jika ada bukti bahwa indikator capaian sasaran terlaksana sesuai misi yang telah direncanakan. Jika tidak ada pengukuran kinerja sangat sulit dicari bentuk nyata dari pencapaian instansi tersebut. Penilaian kinerja terhadap suatu instansi publik merupakan hal yang sangat penting terutama dalam melakukan perbaikan pada masa yang akan datang”.

Menurut Mahmudi yang dikutip oleh M. Alderajat (2015, p. 12)

“pengukuran kinerja adalah alat untuk menilai sesuatu organisasi. Kemudian, dalam konteks organisasi sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Masyarakat akan menilai organisasi sektor publik melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas maka disimpulkan bahwasannya pengukuran kinerja merupakan suatu cara atau metode yang digunakan guna mengetahui dan menilai sejauh mana tujuan, sasaran dan output dari suatu organisasi dapat tercapai.

2.1.4. Evaluasi Kinerja

Whittaker dalam Mahsun Yang di Kutip Oleh Sartika menjelaskan urgensi pengukuran kinerja sebagai alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Sehingga dapat disimpulkan kinerja merupakan alat manajemen organisasi dan pengukuran kinerja merupakan bagian dari sistem pengambilan keputusan dan akuntabilitas organisasi (Sartika, 2015, p. 136)

Definisi penilaian (evaluating) adalah: "Proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya. Ada beberapa hal yang penting diperhatikan dalam definisi tersebut, yaitu: 1) Bahwa penilaian merupakan fungsi organik karena pelaksanaan fungsi tersebut turut menentukan mati hidupnya suatu organisasi. 2) Bahwa penilaian itu adalah suatu proses yang berarti bahwa penilaian adalah kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen. 3) Bahwa penilaian menunjukkan jurang pemisah antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dengan hasil yang seharusnya dicapai"

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi.

2.1.5. Tujuan dan Manfaat Manajemen Kinerja

Untuk mewujudkan tujuan suatu perusahaan agar dapat menerapkan konsep manajemen kinerja yang berkualitas dan profesional maka kita perlu memahami apa yang menjadi tujuan secara menyeluruh dan spesifik dari kinerja manajemen. Dalam hal ini Michael Armstrong mengatakan, "tujuan

menyeluruh manajemen kinerja adalah untuk menumbuhkan budaya di mana individu dan kelompok bertanggung jawab atas peningkatan proses bisnis dan peningkatan keterampilan dan kontribusi suatu mereka sendiri" Artinya, peningkatan manajemen kinerja bukan hanya berpengaruh pada peningkatan hasil di perusahaan saja. Namun lebih jauh dari itu, yaitu mampu menjadi nilai tambah bagi para karyawan. Seorang karyawan pada saat diterapkannya konsep manajemen kinerja maka kemampuan dan kualitas dalam bekerja juga menjadi lebih baik, karena ia terbiasa bekerja sesuai dengan konsep tujuan dan elemen manajemen kinerja. Adapun tujuan spesifik penerapannya manajemen kinerja (Akhmad Fauzi, 2020, p. 9) Michael Armstrong mengatakan bahwa tujuan spesifik manajemen kinerja adalah untuk:

1. Mencapai peningkatan yang dapat diraih dalam kinerja organisasi;
2. Bertindak sebagai pendorong perubahan dalam mengembangkan suatu budaya yang berorientasi pada kinerja;
3. Meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan;
4. Mendukung individu mengembangkan kemampuan, dan meningkatkan kepuasan kerja mereka serta mencapai potensi penuh bagi keuntungan mereka sendiri dan organisasi secara keseluruhan; mengembangkan hubungan yang konstruktif dan terbuka antara individu dan manajer dalam suatu proses dialog dengan pekerjaan yang sedang dilaksanakan sepanjang tahun;
5. Memberikan suatu kerangka kerja bagi kesepakatan sasaran bagaimana diekspresikan dalam target dan standar kinerja sehingga pengertian bersama tentang sasaran dan peran yang harus dimainkan manajer dan individu dalam mencapai sasaran tersebut meningkat;
6. Memusatkan perhatian pada atribut dan efektifitas yang diperlukan agar dapat diterapkan secara dan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengembangkan atribut dan kompetensi tersebut;
7. Memberikan ukuran yang akurat dan objektif dalam dengan target dan standar yang disepakati sehingga individu menerima umpan balik dari manajer tentang seberapa baik yang mereka lakukan;

8. Memberi kesempatan individu untuk mengungkapkan aspirasi dan perhatian mereka tentang pekerjaan mereka;
9. Menunjukkan pada setiap orang bahwa organisasi menilai mereka sebagai individu;

Bagi organisasi manajemen kinerja akan memberikan manfaat yang sangat jelas. Organisasi bekerja lebih efektif bila tujuan-tujuan organisasi, unit-unit kerja yang lebih kecil, dan tanggung jawab setiap pegawai semuanya terhubungkan. Bilamana orang-orang di dalam organisasi memahami bagaimana pekerjaan mereka memberikan kontribusi bagi keberhasilan perusahaan, semangat, dan produktivitas biasanya meningkat. Suatu perusahaan dapat menampilkan semua bagiannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen kinerja adalah kunci untuk membuat rangkaian ini terlihat jelas oleh semua orang. Ada satu alasan lagi mengapa manajemen kinerja ini penting, sebuah alasan hukum yang serius (Akhmad Fauzi, 2020, pp. 13-14)

2.1.6. Model Pengukuran Kinerja

Model pengukuran kinerja organisasi menurut Dwiyanto (dalam A. Fauzi, 2020, p. 16), meliputi:

- 1) Produktivitas yaitu konsep ini tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, namun juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output. Konsep produktivitas diperluas pada seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.
- 2) Kualitas pelayanan yaitu kinerja pelayanan juga dapat dilihat dari kualitas pelayanan yang diberikan organisasi publik terhadap masyarakat. Karena sekarang ini, kualitas pelayanan menjadi cenderung penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak terjadi kasus ketidakpuasan terhadap kualitas pelayanan dari suatu organisasi publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan yang didapat, dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Penggunaan kepuasan

masyarakat menjadi keuntungan karena informasi tentang kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah.

- 3) Responsivitas yaitu merupakan bagaimana kemampuan organisasi untuk merespon dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan. Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 4) Responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
- 5) Akuntabilitas yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih rakyat. Kinerja organisasi publik tidak hanya biasa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dimulai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan organisasi itu dianggap benar sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat

dengan, model pengukuran kinerja yang tertera di maka peneliti akan mengukur kinerja dinas terkait pemeliharaan jalan, melalui: kelima model yang sudah dijelaskan diatas. Berdasarkan beberapa model pengukuran kinerja di atas, peneliti akan menggunakan model pengukuran kinerja yang memuat tentang Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas yang di lakukan. Peneliti memilih model tersebut dikarenakan model pengukuran ini peneliti rasa memiliki indikator yang sesuai dan relevan untuk di gunakan sebagai indikator yang untuk mengukur efektivitas kinerja organisasi terkait dengan pelayanan publik.

2.2. Infrastruktur Jalan

2.2.1. Pengertian Infrastruktur

Menurut Familoni yang di kutip oleh M. Ali Derajat (2015, p. 20) mengatakan infrastruktur sebagai basic essential service dalam proses pembangunan. Infrastruktur mengacu pada fasilitas kapital fisik dan termasuk kerangka kerja organisasional. Selanjutnya infrastruktur dibagi menjadi dua yaitu infrastruktur yang berdasarkan fungsi dan juga infrastruktur berdasarkan peruntukan. Infrastruktur ialah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau diperlukan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan pada penyediaan air, energi listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar buat memfasilitasi tujuan-tujuan sosial serta ekonomi.

Menurut Purwoto dkk (2020, p. 20), pemeliharaan infrastruktur jalan memiliki beberapa manfaat yaitu:

1. Perubahan biaya relatif dari sarana transportasi tertentu terhadap sarana transportasi lainnya;
2. Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat;
3. Peningkatan ketersediaan sarana transportasi;
4. peningkatan kualitas perjalanan (waktu, kecepatan, peningkatan kualitas sarana infrastrukturnya);
5. Pengaruh pada tata guna lahan akibat migrasi antar daerah dan perubahan pola pemukiman;
6. Peningkatan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya juga mempengaruhi timbulnya perubahan pola dan struktur masyarakat;
7. Perubahan demografis;
8. Perubahan perilaku operasional dunia setempat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai pengertian dari infrastruktur dapat di simpulkan bahwa infrastruktur merupakan suatu penunjang kehidupan sehari-hari yang sangat penting. Infrastruktur merupakan sistem fisik yang diharapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar insan pada

lingkup sosial dan ekonomi. Infrastruktur ini merujuk kepada infrastruktur fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas jalan, kereta api, air bersih, bandara, waduk, tanggul, telekomunikasi, infrastruktur selain fasilitas yang dapat mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat.

2.2.3. Pengertian Jalan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 30 tahun 2021 Pasal 1 yang di maksud jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel..

2.3. Pelayanan Publik

2.3.1. Pengertian Pelayanan Publik

Salah satu tugas pokok terpenting pemerintah adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan pembiayaan maupun gratis guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat (Muhammad Fitri Rahmadana, 2020, p. 2).

Ada tiga alasan mengapa pelayanan publik menjadi titik strategis untuk memulai mengembangkan dan menerapkan good governance di Indonesia,

1. Pelayanan publik selama ini menjadi bagian penting di mana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
2. Pelayanan publik adalah tempat di pemerintahan yang bersih dan good governance dapat diartikulasikan secara mudah.

3. Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur pemerintahan, yaitu: pemerintah, swasta, masyarakat, dan mekanisme pasar. mana berbagai aspek

2.3.2. Tujuan Pelayanan Publik

Tujuan pelayanan publik adalah memberikan kepuasan dan layanan yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelayanan pada umumnya. Agar dapat mencapai target tersebut maka kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat harus menjadi target pemerintahan (Muhammad Fitri Rahmadana, 2020, p. 3)

2.3.3. Asas dan Prinsip Pelayanan Publik

Pelayanan publik kepada masyarakat adalah bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah baik dalam bentuk barang maupun jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun dengan tujuan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada asas dan prinsip pelayanan (Muhammad Fitri Rahmadana, 2020, p. 3).

Terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

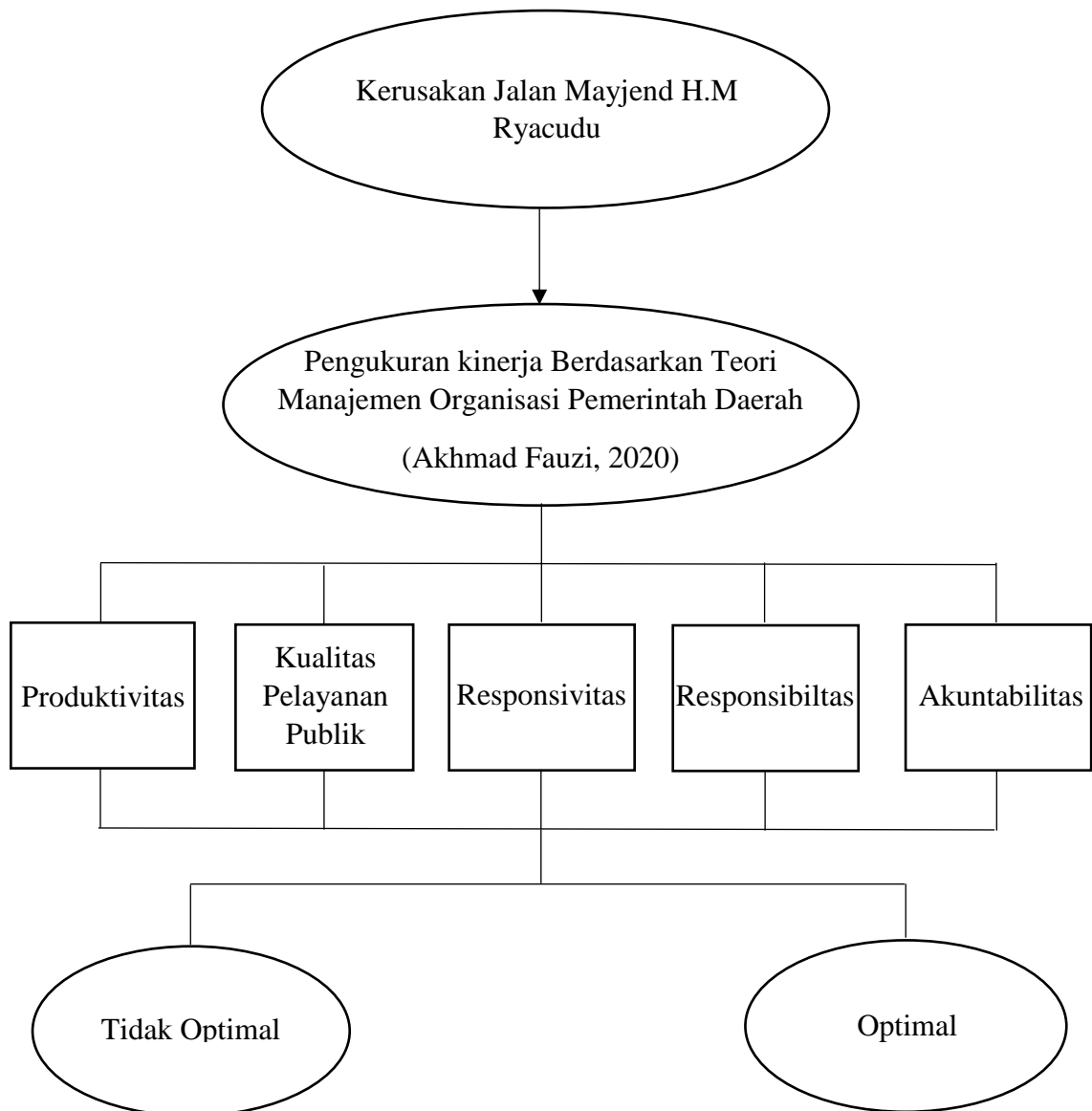
1. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (goods) atau jasa-jasa (services).
2. Penerima layanan. yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (customer) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
3. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
4. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang dan atau jasa yang mereka nikmati

2.4. Kerangka Pikir

Kondisi jalan di Kecamatan Sukarame tepatnya di Jalan Mayjend H.M. Ryacudu saat ini sudah mengalami perbaikan yang hampir rampung setelah menunggu sekitar 3 tahun untuk perbaikan jalan ini. Upaya perbaikan jalan dan pemeliharaan jalan merupakan bentuk kinerja dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Untuk melihat sejauh mana kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi tersebut, peneliti mengukur kinerja dengan menggunakan model pengukuran kinerja sesuai dengan manajemen organisasi dalam kegiatan pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan.

Melalui kedua indikator di bawah ini akan diketahui bagaimana kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukarame.

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka di susun kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 6. Kerangka Pikir
(Sumber data: diolah oleh peneliti 2021)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan metode dengan beraneka segi fokus yang meliputi suatu interpretif, konstruktif, pendekatan naturalistik pada subjeknya (Trumbull & Watson, dalam Zulazmi 2018). Hal ini bermakna penelitian kualitatif mempelajari sesuatu pada sudut pandang alamiahnya, menerjemahkannya, dan melihat fenomena dalam hal makna yang dipahami manusia. Dengan kata lain penelitian kualitatif dapat mempelajari sisi nyata dunia, menemukan bagaimana orang mengatasi sesuatu dan berkembang dalam situasi tersebut yang menggambarkan kehidupan manusia kontekstual (Yin, dalam Zulazmi 2018). Penelitian kualitatif meliputi studi yang menggunakan dan mengumpulkan beragam studi kasus bahan empiris, pengalaman pribadi, introspektif, cerita kehidupan, wawancara, observasional, historikal, interaksional, dan teks visual yang menggambarkan peristiwa rutinitas dan problematis dan makna dari kehidupan individual (Trumbull & Watson, dalam Zulazmi 2018)

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut mengenai penelitian kualitatif dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada fenomena sosial yang kemudian dapat digunakan untuk merumuskan kategori-kategori permasalahan sebagai konsep untuk membandingkan data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan secara sistematis dari kondisi, situasi, fenomena dan program pelayanan tentang kehidupan masyarakat. Sehingga pada akhirnya dapat mengungkapkan, menggambarkan dan menginterpretasikan secara jelas dan utuh bagaimana kinerja pemerintah, khususnya Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

3.2. Lokasi dan Waktu

Dalam penelitian ini lokasi dan waktunya di sesuaikan dengan lokasi yang dapat membantu kelancaran proses penelitian. Lokasi penelitian di lakukan di kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, dan di ruas jalan Mayjend H.M. Ryacudu yang rusak parah sejak di bangunnya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) pada tahun 2019 lalu, yang hingga kini sudah di lakukan perbaikan yang sudah hampir rampung per-November 2021.

Lokasi ini dipilih karena Kecamatan Sukarame dan Jalan Ryacudu merupakan jalan yang menghubungkan antar kota dan pintu Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang mana dengan situasi ini kondisi jalan Ryacudu akan sangat berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan juga dapat berpengaruh pada tingkat perekonomian masyarakat.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya fokus penelitian akan memudahkan peneliti dalam memilah data karena data yang di peroleh dari lapangan akan sangat banyak. Karenanya, fokus penelitian sangat berperan dalam mengarahkan dan membatasi proses penelitian yang di lakukan. Dengan fokus penelitian ini, pemilihan informan di lapangan akan langsung berkaitan dengan masalah yang di teliti, sehingga fokus dan rumusan masalah akan saling berkaitan. (Suyitno, 2018, pp. 81-82)

Penelitian ini memiliki fokus penelitian yaitu kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam pemeliharaan infrastruktur jalan di kecamatan Sukarame, yang dapat di nilai berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Produktivitas yaitu konsep ini tidak hanya mengukur tingkat efesiensi, namun juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dan output.

2. Kualitas Pelayanan, yang akan di nilai dari kualitas pelayanan yang diberikan organisasi publik terhadap masyarakat. Karena sekarang ini, kualitas pelayanan menjadi cenderung penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik
3. Responsivitas, yang mana akan di lihat dari kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyusun prioritas kebutuhan dan mengembangkannya ke dalam berbagai program pelayanan.
4. Responsibilitas yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.
5. Akuntabilitas yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih rakyat. Kinerja organisasi publik tidak hanya biasa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target.

3.4. Informan

Menurut Sugiyono (2019:18) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Dalam pelaksanaannya penelitian ini menggunakan Teknik sampel *purposive* yang berarti informan dipilih berdasarkan karakteristik tertentu yang di anggap memiliki kepentingan dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah seorang yang mengerti dan paham akan kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Asep Wirakarsa selaku Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
2. M. Abdillah selaku Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
3. Helen Anggraini selaku Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
4. Rahayu Sulistyorini selaku Ahli Jalan
5. Selanjutnya, beberapa informan tambahan dari penelitian ini yaitu masyarakat pengguna jalan di Kecamatan Sukarame:
 - a. Putra
 - b. Solihin
 - c. Apri
 - d. Sri Lestari
 - e. Ismet

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, rekaman, lisan, gambar, angka, dan juga berbagai bentuk data lain yang dapat di jadikan bentuk teks. Sumber data tersebut dapat berasal dari wawancara, survei, observasi, dokumentasi, rekaman, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi (Sugiyono, 2019:304). Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara menggunakan Bahasa formal dan informal

menyesuaikan dengan keadaan dan situasi lawan bicara kemudian di ringkas kembali menggunakan Bahasa formal.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Kepala Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Dan wawancara juga dilakukan dengan beberapa masyarakat kecamatan Sukarame terutama masyarakat di sekitar jalur dua jalan Ryacudu.

2. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang menjadi fokus penelitian. (Sugiyono, 2019:297) Observasi adalah metode atau cara untuk mengumpulkan data penelitian yang bersifat dasar naturalistic dalam konteks natural. Kemudian Nawawi dan Martini mengatakan observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sistematis, terdiri dari berbagai gejala yang muncul dari fokus penelitian dan permasalahan yang diteliti. Kemudian data yang didapat akan di susun secara sistematis sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Peneliti melakukan observasi data awal yang berasal dari berbagai artikel berita yang memuat kondisi jalan di tahun 2019, 2020 dan sampai sekarang di 2021. Kemudian peneliti akan melihat keadaan lapangan langsung di jalur dua jalan Ryacudu kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data tertulis yang dibagi dalam dua kategori yaitu formal dan informal. Dalam kategori formal data di peroleh atau dikeluarkan oleh Lembaga resmi sedangkan data informal adalah data yang didapatkan secara individu atau tidak dikeluarkan oleh Lembaga resmi.

3.6. Teknik Pengolahan Data

Setelah peneliti memiliki data yang di perlukan maka akan dilakukan pengolahan data sesuai dengan ketentuan analisis yang telah dibuat.

Notoatmoojjo (Dalam M. Ali, 2015: 38) merumuskan proses pengolahan data melalui tahap-tahap berikut:

1. Identifikasi Data

Melakukan identifikasi ulang data untuk selanjutnya disesuaikan dengan pembahasan, dilakukan dengan cara membedah peraturan, artikel ataupun buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Klasifikasi Data

Tahap klasifikasi data merupakan tahap dimana peneliti mengelompokkan data berdasarkan pada kelompok-kelompok data yang telah di tentukan sebelumnya. Dengan adanya klasifikasi data ini maka proses penelitian akan lebih terarah.

3. Sistematis Data

Merupakan tahap dimana data disusun dan ditempatkan pada setiap pokok secara sistematis untuk mempermudah interpretasi data sehingga tercipta keteraturan dalam menentukan jawaban dari permasalahan yang di angkat.

4. Interpretasi Hasil Pengujian Data

Tahap ini merupakan tahap di mana peneliti sudah melakukan analisis data dengan teliti. Selanjutnya, peneliti menginterpretasikan hasil dari analisis akhir di mana peneliti menyimpulkan inti sari dari serangkaian penelitian dan kemudian membuat kesimpulannya. Dalam

menginterpretasikan data harus di perhatikan hal-hal berikut ini: interpretasi tidak boleh melenceng dari hasil analisis data, interpretasi harus tetap berada dalam lingkup kerangka pikir penelitian.

3.7. Teknik Analisis Data

Widi (Dalam M. Ali, 2015: 40) mengatakan bahwa Teknik analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Ketiga alur kegiatan tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data ini sendiri dapat dikatakan sebagai tahap pemilihan data, menyederhanakan data yang tersedia, pengumpulan gambaran-gambaran data yang diperoleh, dan transformasi dari data-data kasar yang diperoleh dari lapangan. Dalam kegiatan reduksi data ini dilakukan pemilihan tentang: bagian data yang harus di singkirkan, bagian data yang harus diberi kode dan juga menganalisis bagian-bagian data yang harus di ringkas. Jadi, dalam kegiatan ini dilakukan: pengelompokkan data, memperjelas data, pengarah data, bagian data yang tidak perlu dapat di buang, kemudian data dikelompokkan sebagai bahan menarik kesimpulan, reduksi data dalam penelitian ini di lakukan dengan cara menelaah data hasil wawancara.

2. Penyajian data

Nerupakan penyajian sekumpulan data yang di peroleh dari berbagai tahap proses penelitian yang memungkinkan peneliti dapat menarik kesimpulan. Setelah data direduksi selanjutnya peneliti akan menyajikan data yang disusun secara sistematis. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara deskriptif yang mendeskripsikan kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukarame.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam Teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini mengacu pada hasil penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan menyimpulkan bagaimana kinerja Dinas Bina

Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan hasil penelitian.

IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung

4.1.1 Sejarah Singkat

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung merupakan unsur pelaksanaan pemerintah provinsi Lampung dan secara struktural bertanggung jawab kepada gubernur, secara Yuridis formal Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dibentuk melalui restrukturisasi organisasi pemerintah provinsi Lampung, ditetapkan dengan peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dan peraturan gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, tugas dan tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Sebelum Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dibentuk, dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung dan secara struktural bertanggung jawab kepada Gubernur, secara yuridis formal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung dibentuk melalui restrukturisasi organisasi pemerintah Provinsi Lampung, ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 08 tahun 2016 tanggal 21 November 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Lampung dan peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Lampung. dan Peraturan Gubernur Lampung nomor 3 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas

dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Sebelum Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dibentuk, pada tahun 2007 Dinas Pengairan, Dinas Pemukiman dan dinas Bina Marga bergabung menjadi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung, kemudian pada tahun 2009 Bidang pengairan dan pemukiman bergabung menjadi Dinas Pengairan dan pemukiman Provinsi Lampung, sedangkan bidang Bina Marga Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2016 Bidang penataan Ruang Dinas Pengairan dan pemukiman provinsi Lampung bergabung dengan Dinas Bina Marga Provinsi Lampung dan berganti nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung, Kemudian Terakhir pada tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung merupakan instansi pemerintahan yang bekerja di bidang pembangunan jalan dan jembatan berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tugas dekonsentrasi dan pembantu serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan gubernur Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Terwujudnya jaringan jalan Provinsi yang indah, mantap, aman, nyaman, efektif, dan efisien guna mendukung Provinsi Lampung menjadi Provinsi unggulan dan berdaya saing di Indonesia.
2. Misi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
 - a. Memelihara, meningkatkan, dan membangun prasarana jalan dan jembatan untuk melayani kebutuhan masyarakat dibidang prasarana wilayah yang efektif dan efisien.
 - b. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Dinas Bina Marga dalam Pengelolaan jalan.

- c. Meningkatkan tertib Pemanfaatan jalan dan sumber daya dinas bina marga.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, berubah dari nomenklatur sebelumnya yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menjadi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Sementara kedudukan, tugas dan fungsi organisasi mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung.

1. Tugas Pokok Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung.

Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan Provinsi di bidang kebinamargaan dan pembinaan jasa konstruksi yang menjadi kewenangannya, serta tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar pedoman;
 - b. Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar Kabupaten/Kota;
 - c. Peningkatan prasarana/sarana wilayah yang terdiri atas jembatan dan jalan beserta simpul-simpul serta jalan bebas hambatan;
 - d. Perizinan pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota;
 - e. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - f. Pengelolaan katatausahaan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Selanjutnya tugas pokok dibagi kembali kedalam masing-masing bidang sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi memiliki tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinasi pelaksanaan tugas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi melaksanakan tugas rumah tangga di bidang bina marga dan bina konstruksi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sekretariat

Sekretariat Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi memiliki mengatur pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset serta urusan rumah tangga kantor sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku, dan menyelenggarakan sebagian tugas di bidang bina marga, bina konstruksi, dan pengendalian program jalan dan jembatan.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum memiliki tugas melaksanakan pelayanan surat menyurat, tata naskah dinas, kearsipan, perlengkapan dan peralatan, rumah tangga, keprotokolan serta pelayanan umum

4. Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Kepegawaian memiliki tugas menyusun rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, mutasi, promosi dan tata usaha kepegawaian serta menyusun produk hukum dan pengembangan organisasi dan tatalaksana, tata usaha, kepegawaian

5. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan pengungkit serta perbendaharaan.

6. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

Bidang Pembangunan dan Jembatan mempunyai tugas yang dilaksanakan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di bidang pelaksanaan perencanaan teknik, pengawasan teknik dan pengembangan teknologi bidang pembangunan jalan dan jembatan.

a. Seksi Pembangunan Jalan

Seksi Pembangunan Jalan memiliki tugas yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan, pengadministrasian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas pekerjaan pembangunan jalan dan pekerjaan peningkatan jalan.

b. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan Jembatan mempunyai tugas yang meliputi penyiapan bahan penamosan kebijakan, pengadministrasian pelaksanaan, pengadministrasian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas pekerjaan penembatanan jembatan dan pekerjaan jembatan

c. Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan

Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknik, pelaporan serta dokumentasi kegiatan, dan membuat analisis data.

7. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan melaksanakan tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di bidang pelaksanaan perencanaan teknik, pengawasan teknik dan pengembangan teknologi bidang pemeliharaan dan rehabilitasi Jalan dan jembatan.

a. Seksi Pemeliharaan Jalan

Seksi Pemeliharaan Jalan memiliki tugas yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan, pengadministrasian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas pekerjaan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan.

b. Seksi Pemeliharaan Jembatan

Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan, pengadministrasian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas pemeliharaan pemeliharaan

c. Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian dokumen teknik, pelaporan serta dokumentasi kegiatan, dan membuat analisis data.

8. Bidang Bina Konstruksi

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di bidang pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang undangan, pengembangan sistem informasi, penelitian pengembangan, pengembangan SDM bidang konstruksi melalui pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, pengkajian dan peningkatan kemampuan teknologi konstruksi, pengawasan sesuai kewenangan agar terpenuhinya penyelenggaraan penyelenggaraan.

a. Seksi Pengaturan Konstruksi

Seksi Pengaturan Konstruksi memiliki tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, menyebarluaskan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan di bidang jasa konstruksi, melaksanakan koordinasi dan inventarisasi kemitraan jasa konstruksi.

b. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi memiliki tugas untuk menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi.

c. Seksi Pengawasan, Data dan Informasi

Seksi Pengawasan, Data dan informasi mempunyai pengembangan untuk melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan untuk terpenuhinya tertib penyelenggara jasa konstruksi,

melakukan penyelenggaraan dan sistem informasi jasa konstrukni Rincian tugas Seksi Pengawasan, Data dan Informasi.

9. Bidang Bina Program

Bidang Bina Program memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di bidang program perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, perumusan pengembangan jaringan jalan serta pengelolaan data.

a. Seksi Program dan Anggaran

Seksi Program dan Anggaran harus menyiapkan dan menghimpun dana sebagai bahan perencanaan program dan anggaran serta kebijakan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.

b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi

Seksi Pemantauan dan Evaluasi harus dilakukan untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penghimpunan data jalan dan jembatan.

c. Seksi Pengembangan Jaringan dan Data

Seksi Pengembangan Jaringan dan Data memiliki tugas untuk menyiapkan bahan perumusan pengembangan jalan, sistem informasi database, pemanfaatan ruang milik jalan scrtta koordinasi dan kerja sama antar instansi.

4.1.4 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Umum

2) Sub Bagian Kepegawaian

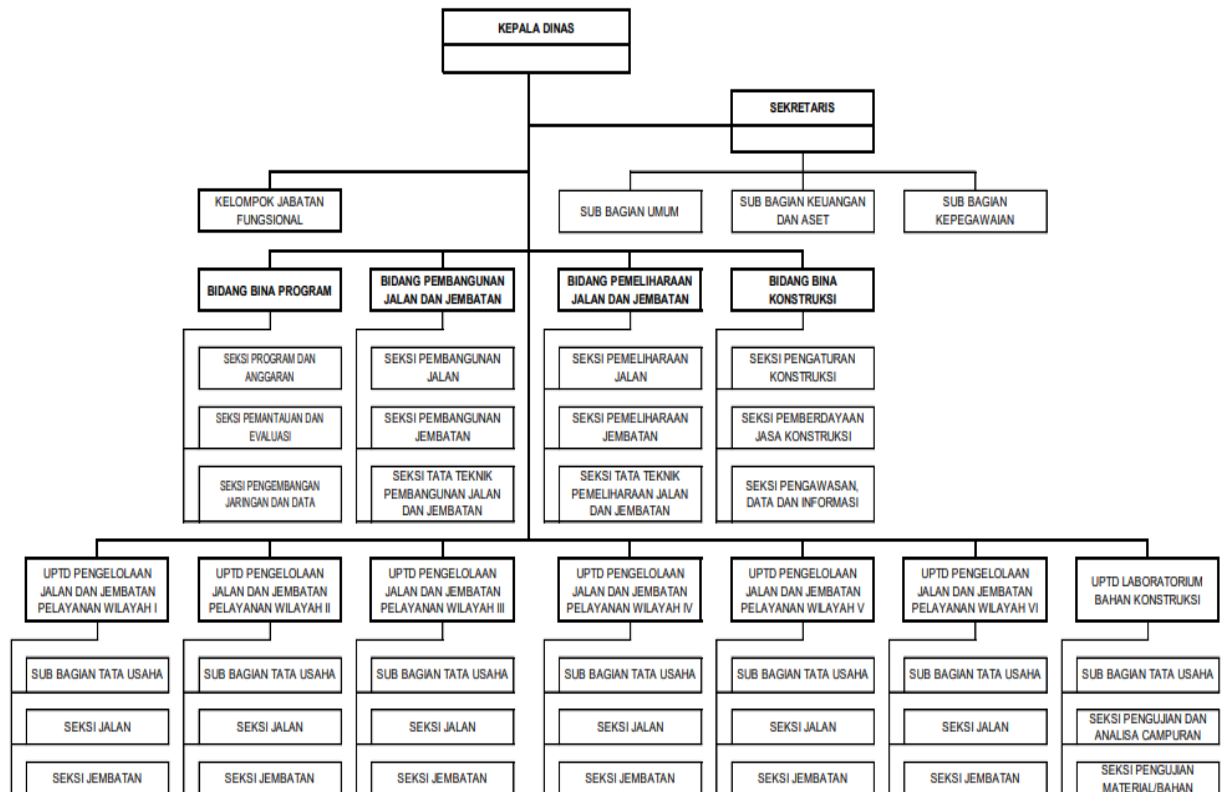
3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahi:

- 1) Seksi Pembangunan Jalan
 - 2) Seksi Pembangunan Jembatan
 - 3) Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi:
- 1) Seksi Pemeliharaan Jalan
 - 2) Seksi Pemeliharaan Jembatan
 - 3) Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- e. Bidang Bina Konstruksi, membawahi:
- 1) Seksi Pengaturan Jasa Kontruksi
 - 2) Seksi Pemberdayaan Jasa Kontruksi
 - 3) Seksi Pengawasan, Data dan Informasi
- f. Bidang Bina Program, membawahi :
- 1) Seksi Program dan Anggaran
 - 2) Seksi Pemantauan dan Evaluasi
 - 3) Seksi Pengembangan Jaringan dan Data
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 7. Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung



(Sumber: Renstra Dinas BMBK 2019-2024)

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

Pada gambaran umum wilayah makro pada penelitian ini yaitu wilayah Kecamatan Sukarame akan dijelaskan secara singkat mengenai beberapa hal yang meliputi letak geografis Kecamatan Sukarame, Administrasi Kecamatan Sukarame, topografi yang terdapat di Kecamatan Sukarame serta demografi yang ada di Kecamatan Sukarame.

4.2.1 Geografis

Kecamatan Sukarame merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Secara Geografis Kecamatan Sukarame terletak di ujung timur Kota Bandar Lampung dan memiliki luas wilayah sebesar 1.771 Ha dengan Kelurahan Sukarame memiliki luas wilayah terluas yaitu sebesar 493 Ha dan wilayah Kelurahan Way Dadi memiliki luas wilayah terkecil yaitu sebesar 247 Ha. Adapun pusat pemerintahannya dari Kecamatan Sukarame berada di Kelurahan Sukarame. Secara letak geografis wilayah Kecamatan Sukarame memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kedamaian

Adapun luas wilayah kelurahan-kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sukarame sebagai berikut:

Tabel 4. Luas Wilayah Sukarame

No.	Nama Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
1.	Sukarame	493
2.	Sukarame Baru	248
3.	Korpri Jaya	249
4.	Korpri Raya	250
5.	Way Dadi	247
6.	Way Dadi Baru	284

(Sumber: BPS Kecamatan Sukarame)

4.2.2 Administrasi

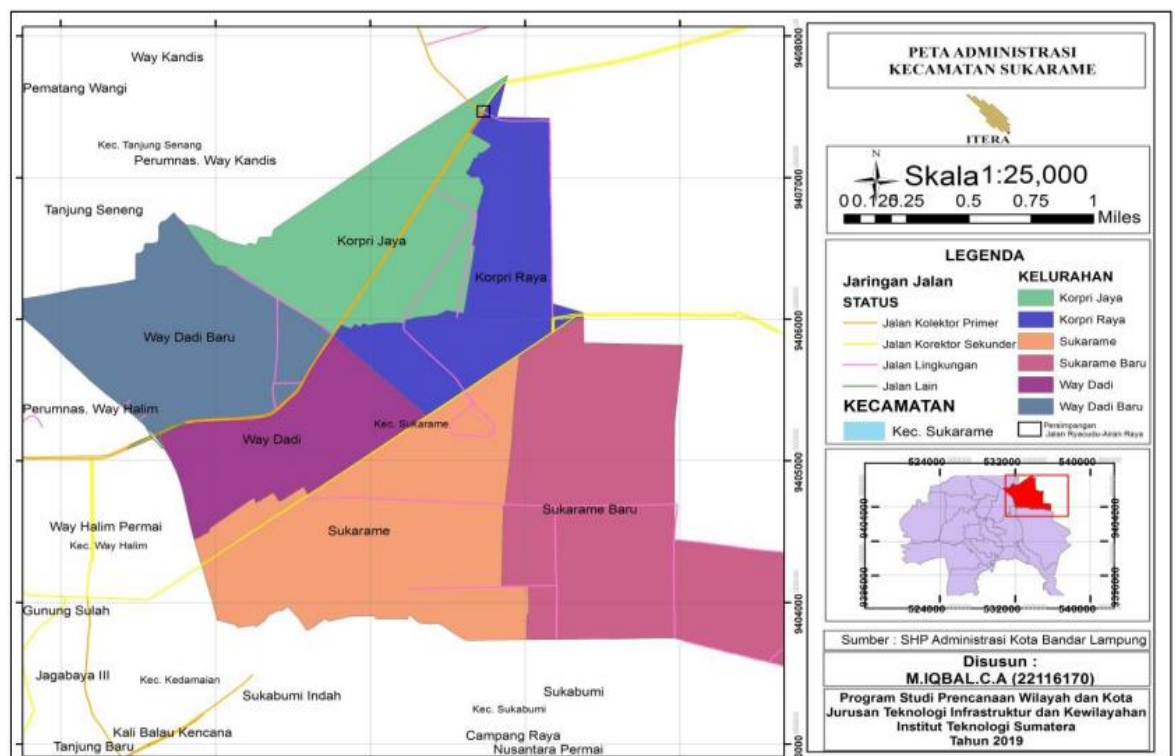
Secara administrasi wilayah Kecamatan Sukarame diatur dan dijelaskan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012

tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, adapun wilayah Kecamatan Sukarame memiliki 6 kelurahan yaitu sebagai berikut:

1. Kelurahan Korpri Jaya
2. Kelurahan Korpri Raya
3. Kelurahan Sukarame
4. Kelurahan Sukarame Baru
5. Kelurahan Way Dadi
6. Kelurahan Way Dadi Baru

Berikut ini merupakan peta administrasi wilayah Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

Gambar 8. Peta Administrasi Wilayah Kecamatan Sukarame



(Sumber: BPS Kecamatan Sukarame)

4.2.3 Topografi

Secara keseluruhan Kecamatan Sukarame terdiri dari dataran rendah dan sedikit berbukit, dibagian dataran rendah tanahnya tersusun dari lapisan tanah keabu abuan

dan tanah liat berwarna merah, sedangkan dibagian dataran berbukit terdiri dari lapisan batu putih. Ada beberapa gunung yang terdapat di Kecamatan Sukarame antara lain Gunung Sulah, Gunung Langgar dan Gunung Kancil. Pada umumnya gunung-gunung tersebut tidak aktif atau tidak produktif dan telah diolah menjadi kawasan permukiman penduduk melalui dukungan dari KPR-BTN baik tipe RS maupun RSS Letak. Selain memiliki gunung-gunung, Kecamatan Sukarame pun memiliki sungai yang pada umumnya mengalir dari utara ke selatan karena di sebelah utara yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelah selatan. Sungai-sungai yang terdapat di Kecamatan Sukarame antara lain yaitu Sungai Way Balau, Sungai Way Cirebon dan Sungai Way Halim.

Tabel 5. Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut menurut Kelurahan di Kecamatan Sukarame, Tahun 2018

No.	Kelurahan	Tinggi Rata-Rata dari Permukaan Laut (m)
1.	Sukarame	370
2.	Sukarame Baru	108
3.	Korpri Jaya	860
4.	Korpri Raya	820
5.	Way Dadi	910
6.	Way Dadi Baru	108

(Sumber: BPS Kecamatan Sukarame)

4.2.4 Demografi

Untuk demografi dari Kecamatan Sukarame akan ditunjukkan beberapa informasi mengenai beberapa hal antara lain jumlah penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sukarame tahun 2017 dan kepadatan penduduk menurut kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sukarame tahun 2017, yang dimana informasi mengenai data-data tersebut dijelaskan melalui tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan menurut Kelurahan di Kecamatan Sukarame, Tahun 2018

No.	Kelurahan	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)
1.	Sukarame	6088	6.132
2.	Sukarame Baru	6.803	6.887
3.	Korpri Jaya	3.929	4.035
4.	Korpri Raya	1.940	1.953
5.	Way Dadi	5.182	5.170
6.	Way Dadi Baru	5.593	5.349
Jumlah		29.535	29.526

(Sumber: BPS Kecamatan Sukarame)

Dari tabel jumlah penduduk berdasarkan laki-laki dan perempuan menurut kelurahan di Kecamatan Sukarame di atas dapat diketahui bahwa kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu Kelurahan Sukarame Baru dengan jumlah penduduk sebanyak 13.690 jiwa dan kelurahan dengan jumlah penduduk terdikit yaitu Kelurahan Korpri Raya dengan jumlah penduduk sebanyak 3.893 jiwa.

Tabel 7. Kepadatan Penduduk menurut Kelurahan di Kecamatan Sukarame, Tahun 2018

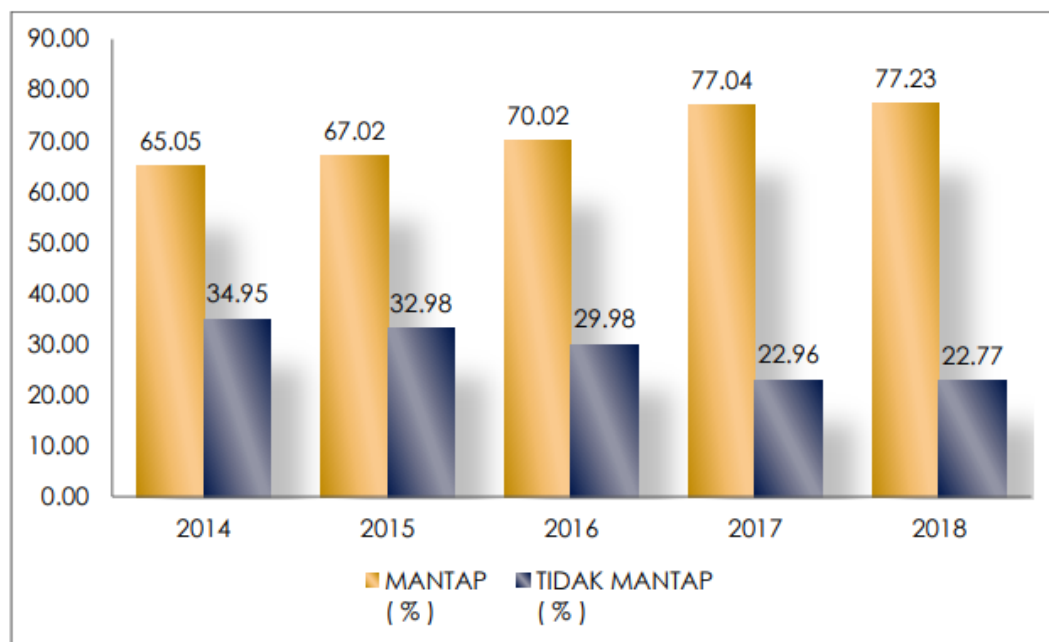
No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Daerah (KM ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ KM ²)
1.	Sukarame	12.220	4,93	2.479
2.	Sukarame Baru	13.690	2,48	5.520
3.	Korpri Jaya	7.964	2,49	3.198
4.	Korpri Raya	3.893	2,50	1.557
5.	Way Dadi	10.352	2,47	4.191
6.	Way Dadi Baru	10.942	2,84	3.853
Jumlah		59.061	17,71	3.335

(Sumber: BPS Kecamatan Sukarame)

4.3 Kondisi Jalan Provinsi Lampung

Pengelolaan jaringan jalan dan jembatan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung berpedoman kepada asas desentralisasi (pengelolaan jalan dan jembatan provinsi) dan asas dekonsentrasi (pengelolaan jalan dan jembatan nasional). Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/234.a/III.09/HK/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi memiliki kewajiban dalam hal penyelenggaraan dan penanganan ruas jalan provinsi sebesar 1,693.273 Km (99 Ruas Jalan), dengan jumlah jembatan sebanyak 658 buah, tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Gambar 9. Grafik Kondisi Jalan Provinsi Lampung Tahun 2014-2018



(Sumber: Renstra Dinas BMBK 2019-2024)

Pada gambar di atas terlihat kenaikan persentase kondisi jalan mantap Provinsi Lampung dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Persentase kenaikan kondisi jalan mantap terbesar terjadi pada tahun 2016 ke tahun 2017, yaitu sebesar 7,02%. Sedangkan persentase kenaikan terkecil terjadi pada tahun 2017 ke tahun 2018. Survey Kondisi jalan terakhir, yaitu tahun 2018 akhir, menunjukkan Kondisi jalan mantap Provinsi Lampung sebesar 77,23%. Dan kondisi jalan tidak mantap Provinsi Lampung sebesar 22,77%.

Dari hasil survey ruas jalan Provinsi Lampung pada desember 2018 sebesar 77,227% kondisi mantap (kondisi baik + sedang). Dari hasil tersebut menunjukkan target RENSTRA 2018 sebesar 80% kondisi mantap ruas jalan Provinsi tidak tercapai. Hal ini dikarenakan:

1. Pembangunan jalan pada beberapa ruas lebih menekankan pada peningkatan kapasitas (pelebaran jalan) khususnya pada kegiatan-kegiatan pembangunan jalan yang dibiayai oleh pinjaman PT. Sarana Multi Infrastruktur.
2. Tidak terlaksananya kegiatan-kegiatan yang dibiayai APBD Perubahan, sehingga Panjang penanganan pada tahun 2018 hanya sebesar 132,321 km atau 7,8% 3.
3. Penurunan kondisi jalan (Degradasi) secara signifikan yang diakibatkan melonjaknya volume kendaraan dan tonase muatan implikasi beroperasinya jalan tol sumatera.
4. Terjadinya bencana alam di beberapa titik ruas Provinsi yang menyebabkan rusaknya infrastruktur jalan

Selanjutnya, untuk Panjang ruas jalan Kota Bandar Lampung dapat dilihat padatable dibawah ini:

Uraian/Description	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. JENIS PERMUKAAN	900,320	922,568	353,641	353,641	556,216
a. Aspal	900,320	922,568	325,255	338,751	542,333
b. Kerikil/Onderslag	-	-	11,560	6,768	8,330
c. Tanah/Awcas	-	-	16,826	8,122	5,553
d. Tidak dirinci	-	-	-	-	-
II. KONDISI JALAN	900,320	918,568	353,640	353,641	556,216
a. Baik	854,188	733,78	931,200	983,251	216,987
b. Sedang	-	51,896	144,830	163,679	245,370
c. Rusak	46,132	60,395	121,120	137,503	79,976
d. Rusak Berat	-	72,497	156,490	62,574	13,883
e. Tidak Dirinci	-	-	-	6,634	-
III. KELAS JALAN	900,320	922,568	353,641	353,641	556,216
a. Kelas I	-	-	-	-	-
b. Kelas II	-	-	-	-	-
c. Kelas III	-	-	-	-	-
d. Kelas III.A	900,320	922,568	93,430	33,500	33,500
e. Kelas III.B	-	-	471,530	131,010	131,010
f. Kelas III.C	-	-	422,583	229,650	229,650
g. Tidak Dirinci	-	-	366,098	959,481	162,056

(sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung)

4.4. Kondisi Jalan Mayjend H.M Ryacudu

Jalan Mayjend H.M Ryacudu merupakan salah satu ruas jalan yang ada di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Jalan ini merupakan jalan provinsi dengan sistem jaringan jalan primer dimana jalan ini memiliki jaringan jaringan jalan dengan pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan semua wilayah, yang menghubungkan simpul jasa distribusi yang berwujud kota. Jalan Mayjend H.M Ryacudu ini merupakan jalan lingkungan yang melayani angkutan, dan memiliki dua koridor.

Jalan Mayjend H.M Ryacudu mengalami kerusakan sejak dibukanya Pintu Tol Trans Sumatera pada tahun 2019 kemarin mengakibatkan jalan Ryacudu ini otomatis dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar dengan muatan berat yang keluar dari Tol Trans Sumatera tersebut. Kerusakan terjadi disepanjang jalan Ryacudu ini berupa lubang-lubang dan jalan yang bergelombang, kerusakan jalan yang terjadi ini mengakibatkan aktivitas masyarakat sangat terganggu. Dengan keadaan jalan yang berlubang cukup dalam terlebih saat hujan turun maka lubang-lubang tersebut akan tergenang air sehingga pengendara sulit untuk melihat dan menyadari keberadaan lubang jalan yang cukup dalam sehingga tidak jarang banyak pengendara yang tergelincir khususnya para pengendara motor.

Kerusakan jalan ini pada awalnya membuat masyarakat turun tangan sendiri untuk sekedar menimbun dengan batu kerikil supaya lebih aman untuk dilalui, kemudian jalan ini merupakan jalan provinsi yang kewenangan untuk proses pemeliharaan dan pembangunannya ada pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. Pada pertengahan tahun 2019 pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung sempat melakukan perbaikan dengan menimbun dan mengaspal permukaan jalan ini namun tidak lama darisitu jalan ini kembali mengalami kerusakan.

VI SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Dalam Pemeliharaan Jalan (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung) dengan mengukur kinerja menggunakan 5 indikator penelitian yang dikemukakan oleh Dwiyanto (dalam A. Fauzi, 2020, p. 16) yaitu Produktivitas, Kualitas Pelayanan, Responsivitas, Responsibilitas dan juga Akuntabilitas yang dilihat dari tiga sudut pandang yaitu sudut pandang Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, kemudian sudut pandang ahli jalan dan juga sudut pandang masyarakat. maka secara keseluruhan kesimpulan dari penelitian ini adalah Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam Pemeliharaan Jalan di Kecamatan Sukarame sudah optimal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung (Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung), maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pemeliharaan rutin maupun berkala sebaiknya disertai dengan penyuluhan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui bagaimana cara melapor apabila ada kerusakan jalan sehingga data yang didapatkan lebih akurat
2. Untuk aplikasi URC atau Unit Reaksi Cepat agar terus dikembangkan dan supaya dapat digunakan oleh masyarakat luas sehingga masyarakat juga lebih mudah untuk melaporkan kondisi jalan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Akhmad Fauzi, R. H. (2020). *Manajemen Kinerja*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muhammad Fitri Rahmadana, A. T.-a. (2020). *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Prawisentono. (2020). Manajemen Kinerja. In R. H. Akhmad Fauzi, *Manajemen Kinerja* (p. 1). Surabaya: Airlangga University Press.
- Suyitno. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.

SKRIPSI

- Derajad, M. A. (2015). *Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Di kecamatan Suaharjo*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Hidayati, R. (2017). *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Penanggulangan Banjir dan Genangan di Kota Surakarta*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret .
- Indriyani, D. F. (2018). *Analisis Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang dalam Pelayanan Publik Terkait Penyelenggaraan Jalan Daerah (Studi Kasus Kerusakan Jalan)*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia .
- Nahar, A. L. (2017). *Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Salatiga dalam Pengembangan Tata Ruang Wilayah Tahun 2016 (Studi Kasus Taman Tingkir Kota Salatiga)* . Semarang: Universitas Negri Semarang.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, P. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia, R. (2022). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Konstruksi., J. B. (2018). Materi Suplemen Pengetahuan Pembekalan Keprofesian. Ahli Teknik Jalan.
- Lampung, D. B. (2020). *Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024*. Bandar Lampung: Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.

JURNAL

- Abdurrahman, J. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Evaluasi Kinerja Para Pegawai di Kantor Pemerintahan. *Jurnal Penelitian. Aceh: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Iskandar Thani Banda Aceh*.
- Armando Soares, R. N. (2015). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 4 No.2.
- Azmi, Z. A. (2018). Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Akuntansi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, Volume 11, No. 1: 159-168.
- Dewantoro, M. R. (2016). Analisis Kinerja Organisasi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang. *Jurnal Of Public Policy*, Vol. 5 No. 6.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, Vol. 2 No. 2.
- Hendra Julianto, N. J. (2017). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Penataan Kawasan Kumuh Pesisir Kota Tarakan. *Jurnal Sipil Politeknik*, Vol. 4 No. 2.
- Herlinda. (2020). Otonomi Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Dikota Sungai Penuh Tahun 2019. *The Leaders Writing*, 2 Vol. 2 No. 2.
- Ishak, D. D. (2017). Konsep Kinerja Dalam Studi Organisasi Publik. *urnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.7 No.2.
- Lantemona, A. G. (2021). Kinerja Dinas Pemuda Dan Olahraga Dalam Pemberdayaan Generasi Muda (Suatu Studi Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur). *Jurnal Governance*, Vol.1, No.2.
- Mamahit, V. S. (2021). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur (Jalan) Terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Studi kasus di Kecamatan Mooat). *Jurnal Governance*, Vol.1, No. 1.
- Permatasari, I. N. (2019). Analisis Kinerja Dinas Pariwisata Kota Semarang. *Jurnal Of Public Policy*, Vol.2 No.2.

Sartika, D. (2015). Inovasi Organisasi dan Kinerja Organisasi: studi kasus pada pusat kajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur III lembaga Administrasi Negara. *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 11 No.2.

Virginia Sisilia Mamahit, F. S. (2021). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur (Jalan) Terhadap Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Studi Kasus di Kecamatan Mooat). *Jurnal Governance*, Vol. 1 No. 1.

INTERNET

Fernando, O. (2019, April 2). *Rusak Parah, Jalan Ryacudu Akan Dilakukan Perbaikan Sementara*. Retrieved from Rusak Parah, Jalan Ryacudu Akan Dilakukan Perbaikan Sementara: Rusak Parah, Jalan Ryacudu Akan Dilakukan Perbaikan Sementara | kumparan.com

Gautama, W. R. (2021, Oktober 19). *Jalan Ryacudu Bandar Lampung Dibangun Sekelas Jalan Tol, Pengecoran Selesai Oktober 2021*. Retrieved from Jalan Ryacudu Bandar Lampung Dibangun Sekelas Jalan Tol, Pengecoran Selesai Oktober 2021: <https://lampung.suara.com/read/2021/10/19/125415/jalan-ryacudu-bandar-lampung-dibangun-sekelas-jalan-tol-pengecoran-selesai-oktober-2021?page=2>

Kurniawan, M. (2021, September 8). *Infrastruktur – Pengertian, Masalah, Jenis, Contoh Dan Dampaknya*. Retrieved from infrastruktur – Pengertian, Masalah, Jenis, Contoh Dan Dampaknya: <https://www.dosenpendidikan.co.id/infrastruktur/>

Purnama, P. (2021, 11 09). *Sejumlah Ruas Jalan di Bandar Lampung Terendam Banjir*. Retrieved 11 19, 2021, from Sejumlah Ruas Jalan di Bandar Lampung Terendam Banjir: <https://m.lampost.co/berita-sejumlah-ruas-jalan-di-bandar-lampung-terendam-banjir.html>

Putra, M. A. (2019, April 2). *Rusak Parah, Jalan Ryacudu Akan Dilakukan Perbaikan Sementara*. Retrieved from Rusak Parah, Jalan Ryacudu Akan Dilakukan Perbaikan Sementara: <https://kumparan.com/lampunggeh/rusak-parah-jalan-ryacudu-akan-dilakukan-perbaikan-sementara-1554206705591528187/full>

Saputra, D. (2020, April 25). *Belum Lama Diperbaiki, Jalan Ryacudu Kembali Rusak*. Retrieved November 30, 2021, from Belum Lama Diperbaiki, Jalan Ryacudu Kembali Rusak : <https://lampung.tribunnews.com/2020/04/25/belum-lama-diperbaiki-jalan-ryacudu-kembali-rusak>

Sholichin, E. A. (2019, April 2). *Jalan Ryacudu Tak Juga Diperbaiki, Warga Jalur Dua Korpri Bandar Lampung Berinisiatif Timbun Sendiri*. Retrieved from Jalan Ryacudu Tak Juga Diperbaiki, Warga Jalur Dua Korpri Bandar Lampung Berinisiatif Timbun Sendiri:

<https://lampung.tribunnews.com/2019/04/02/jalan-ryacudu-tak-juga-diperbaiki-warga-jalur-dua-korpri-bandar-lampung-berinisiatif-timbun-sendiri?page=3>